INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

# KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS DATA

**MUHAMMAD TAUFIQ**
**Deputi Kebijakan pengembangan Kompetensi**
**LAN RI**

**SURABAYA, 21 September 2023**

# POKOK BAHASAN

- TANTANGAN KEBIJAKAN
- KEBIJAKAN BERBASIS DATA
- STRATEGI PENGUATAN KUALITAS KEBIJAKAN

# Pemerintah Akui Penanggulangan Kemiskinan Tak Tepat Sasaran

*Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,5 persen dan stunting menjadi 14 persen pada 2024.*

**Rayful Mudassir** - Bisnis.com
Selasa, 11 Februari 2020 | 13:08

Share

Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa

# Jokowi Akui Indonesia Kedodoran Masalah Data Pertanian

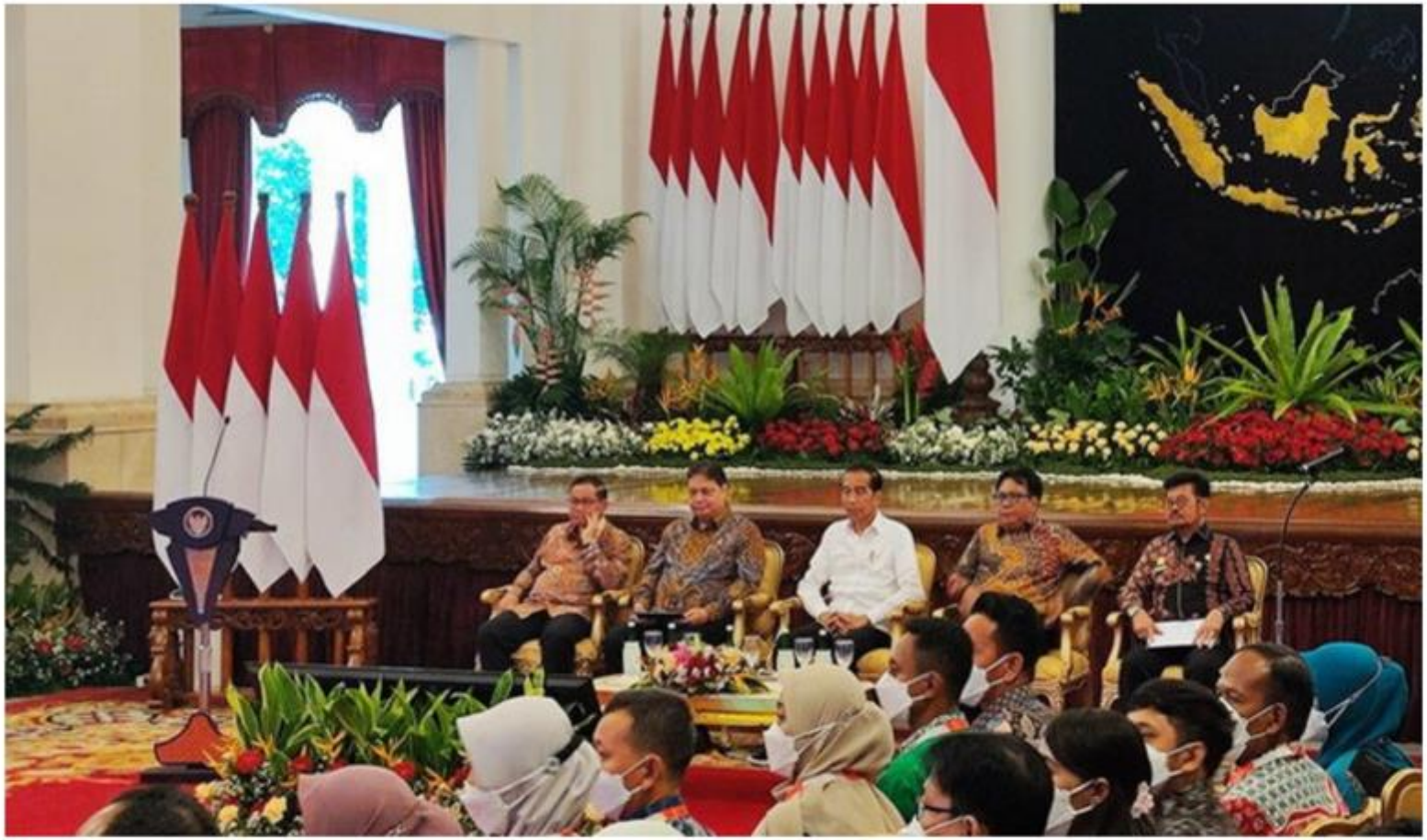

*Sensus Pertanian 2023. tirto.id/Adrian Pratama Taher*

Ikuti Kami di Google News
dengan klik ikon bintang di sini

*Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 15 Mei 2023 13:47 WIB*

*Dibaca Normal 2 menit*

Selasa 11 Apr 2023 15:51 WIB

# Impor Beras Jalan Terus, Data Produksi Beras Dalam Negeri tak Akurat

Produksi beras dalam negeri tahun ini surplus 7,5 juta ton.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Lida Puspaningtyas

Foto: Republika/Wihdan Hidayat

*Pekerja mengangkut karung gula pasir di distributor sembako Arista, Sleman, Yogyakarta, Selasa (4/4/2023). Bupati Sleman, Kustini melakukan inspeksi ke gudang distributor sembako di Sleman untuk menjamin ketersediaan jelang Lebaran Idul Fitri 2023. Beberapa komoditas yang dipantau diantaranya beras, minyak, daging ayam ras, telur ayam ras, gula, dan bawang.*

Advertisement

Terpopuler

1 Pertahankan Kinerja Apik, BRI Life Raih Penghargaan Best Life Insurance 2023

2 Akselerasi Transisi Energi Bersih, PHE ONWJ Bangun PLTS di Cirebon

3 Investors Migas Kumpul di Bali, Sri Mulyani: Habiskan Uang Anda di Indonesia!

4 The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil

5 Optimalkan Energi Panas Bumi

Advertisement

# TANTANGAN KEBIJAKAN

**Konflik**
Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya

**Inkonsisten**
Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dala satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya

**Multitafsir**
Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.

**Tidak operasional**
Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

**KEBIJAKAN YANG BERBASIS BUKTI (masih kurang)**

Sumber: Bappenas (2015)

# GAP ANTARA PENELITIAN DAN KEBIJAKAN

Kegiatan penelitian menghasilkan berbagai data penting (investasi yang besar).

Kesempatan untuk memanfaatkan data dan informasi menjadi knowledge seringkali tidak efektif dilakukan.

Peneliti dan pengambil kebijakan bekerja dalam 'arena' yang berbeda.

# RESEARCH - POLICY RELATIONS

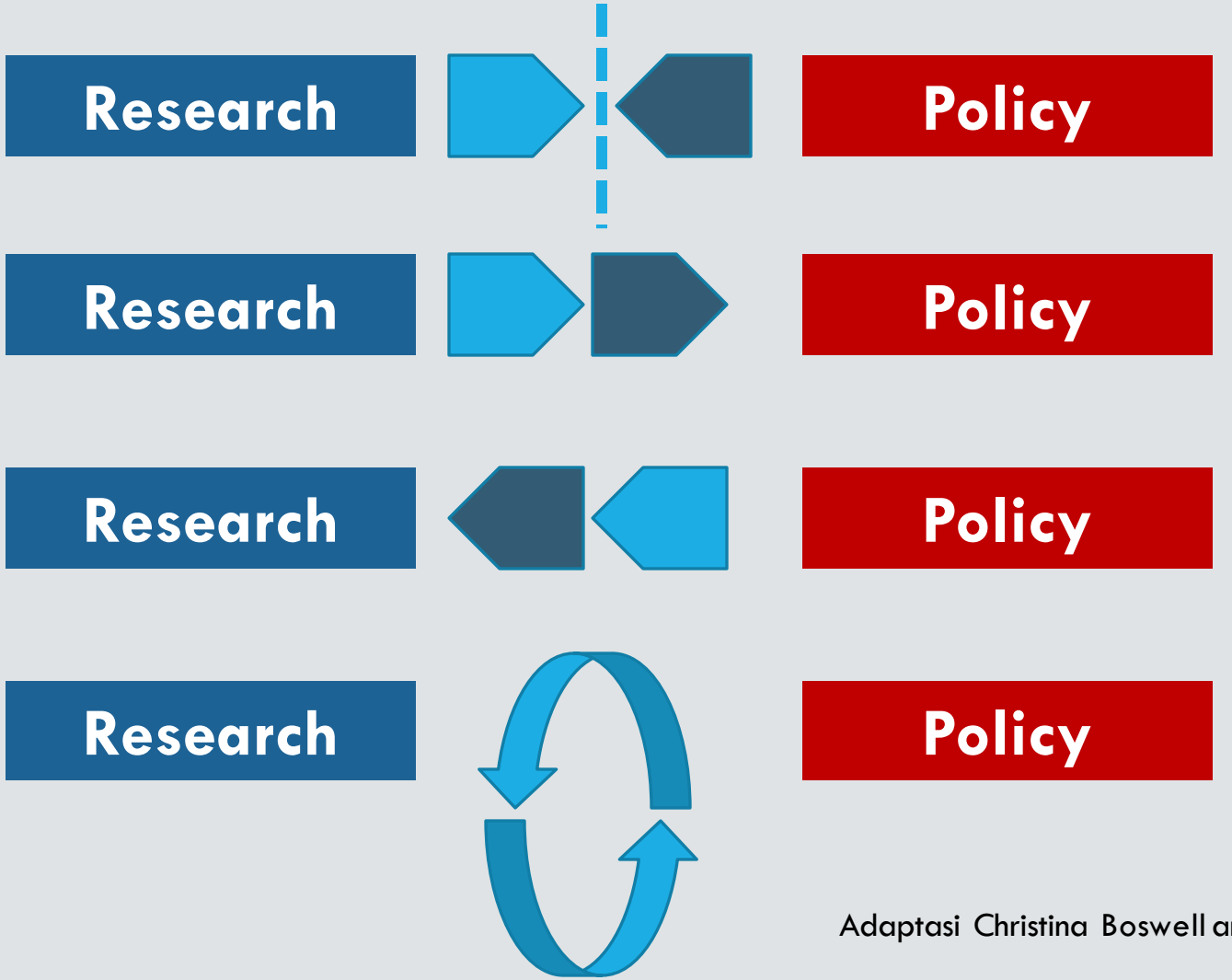


Adaptasi Christina Boswell and Katherine Smith (2017)

# RESEARCH FOR POLICY VS RESEARCH OF POLICY

| | Research for Policy | Research of Policy |
|---|---|---|
| TUJUAN | kegiatan kajian yang dilakukan dengan tujuan mempersiapkan bahan bahan pembuatan kebijakan yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan/ instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam suatu bidang kebijakan. | dilakukan untuk meneliti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan konsep dan pengetahuan tentang kebijakan publik |

| | Research for Policy | Research of Policy |
|---|---|---|
| Proses | merupakan bagian integral dari proses pembuatan kebijakan berbasis evidence | Dilakukan dengan prinsip mandiri dari proses kebijakan untuk menjaga obyektifitas penelitian |
| Pelaku | Kegiatan ini dilakukan oleh para analis kebijakan atau peneliti pada instansi pemerintah | Dilakukan oleh para peneliti |

# TANTANGAN DALAM MEMBANGUN EVIDENCE BASED POLICY

1. Tekanan waktu dalam pembuatan kebijakan
2. Kebijakan transaksional
3. Pengambil keputusan yang kurang menghargai data dan pengetahuan dalam pembuatan kebijakan
4. Lemahnya kualitas dan ketersediaan data
5. Dominannya motif simbolik dan ideologis dalam pengambilan keputusan

# EKOSISTEM PENGETAHUAN KEBIJAKAN

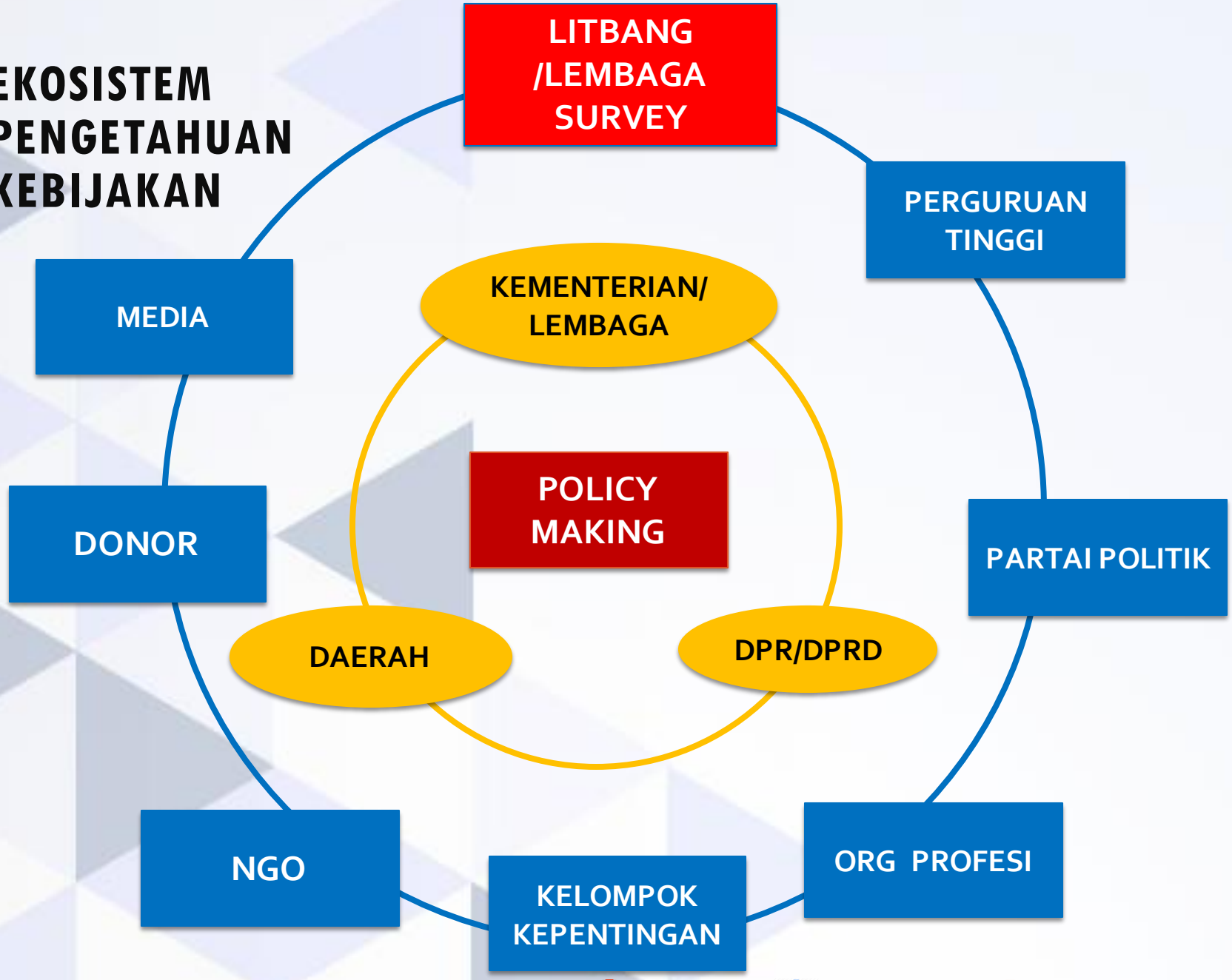

# KNOWLEDGE TO POLICY ECOSYSTEM

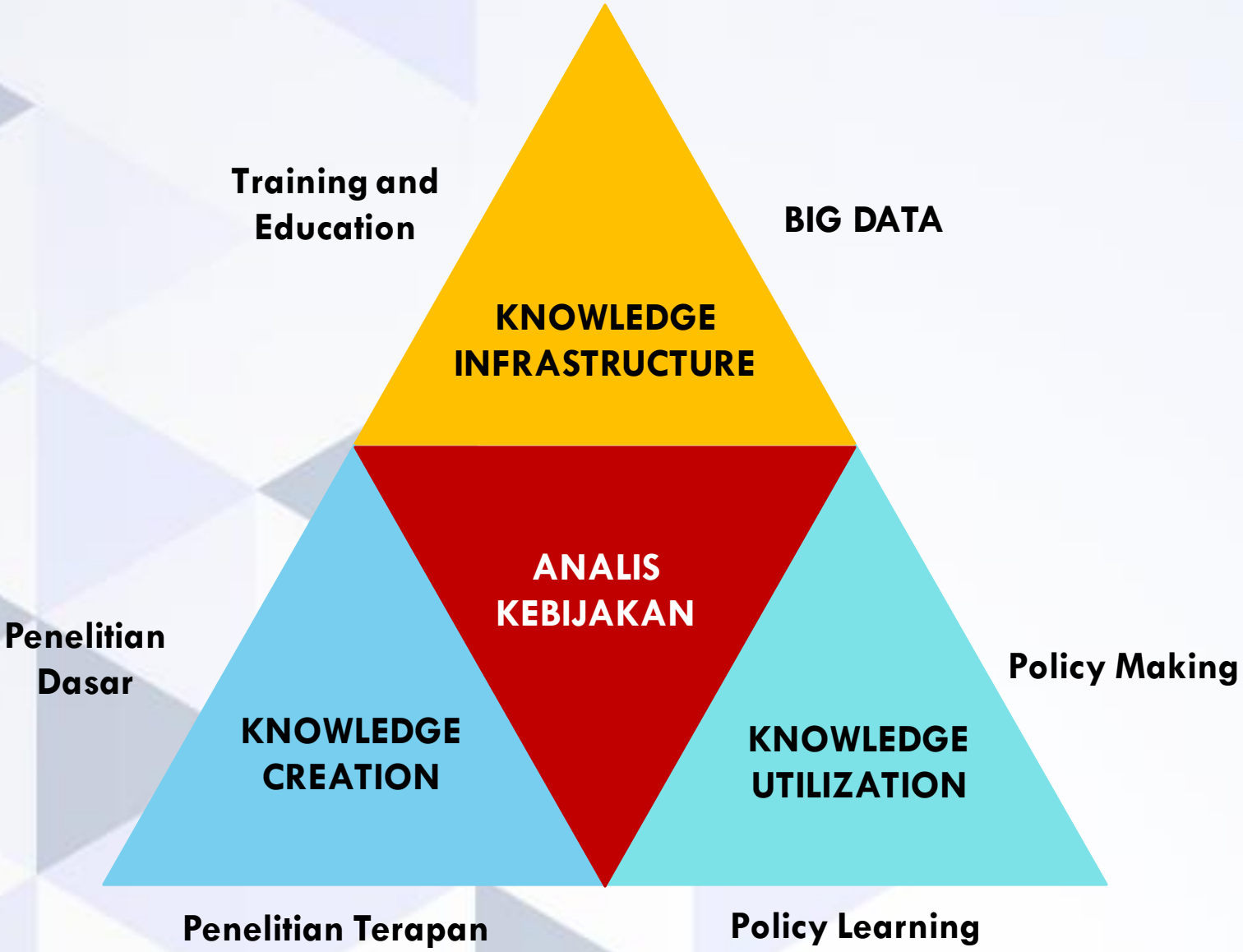

algoritma

Corporate Solutions Individual

# ADA APA DENGAN FACEBOOK, CAMBRIDGE ANALYTICA, DAN DONALD TRUMP?

By Prahariezka Arfienda | *March 28, 2018*

# LESSON LEARNED EVIDENCE BASED DALAM PENANGANAN COVID

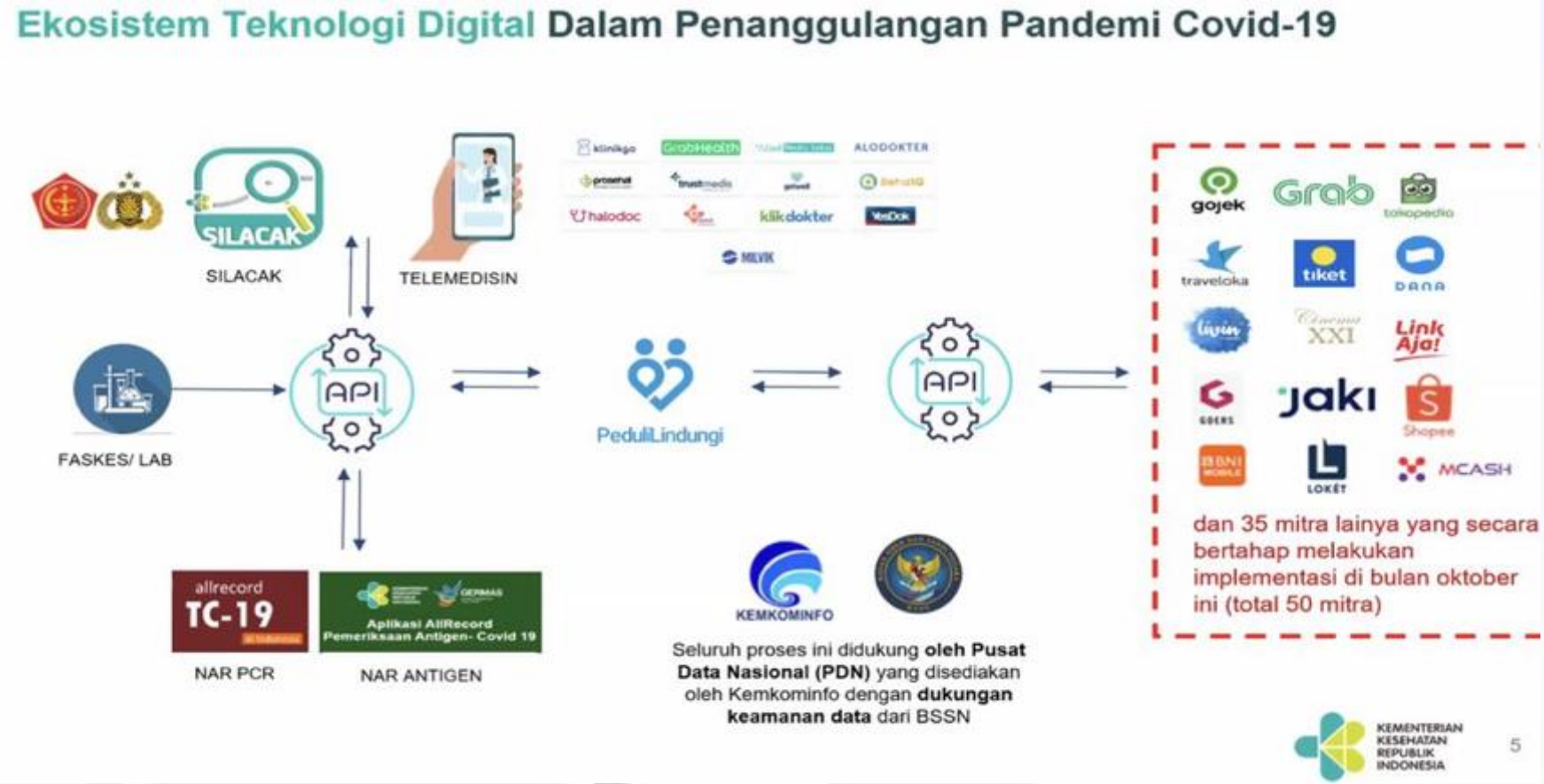

# Tata Kelola Satu Data Indonesia

PERPRES 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA

## SUMBER DATA

- Pemerintah Pusat 87 K/L
- Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kot
- Umum

## PRINSIP SATU DATA

- Satu Standar Data
- Satu Metadata Baku
- Interoperabilitas
- Kode Referensi/Data Induk

Kebijakan Satu Data Indonesia mendorong perbaikan kualitas data melalui penerapan prinsip-prinsip Satu Data

## PEMBINAAN DATA

**Data Keuangan Negara**
Pembina Data : Kementerian Keuangan

**Data Statistik**
Pembina Data : Badan Pusat Statistik

**Data Geospasial**
Pembina Data : Badan Informasi Geospasial

**Data Lainnya**
Pembina Data : Belum ditentukan, kandidat disepakati melalui Forum SDI tingkat pusat dan ditetapkan oleh Presiden

Pembinaan Data berperan dalam menerapkan *data leadership* dan *data quality assurance* pada instansi pemerintah penyelenggara data

## DATA PRIORITAS

- Prioritas Nasional
- Program Strategis Nasional

Terdapat 3 Program Strategis Nasional yang difokuskan untuk tahun 2021, yaitu SDGs, Bansos/Banpem/Subsidi, UMKM

- *Major Project* dalam RPJMN & RKP
- Arahan Presiden (Mendesak)